

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara yang sedang mengalami perkembangan, Indonesia menghadapi tantangan utama pada pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami perkembangan jika kegiatan perekonomian memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.<sup>2</sup>

Teori pertumbuhan Klasik juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor luas wilayah.<sup>3</sup> Luas wilayah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang pertama, potensi sumber daya alam yang melimpah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertambangan, pertanian, perikanan, dan kelautan.

Kedua, adanya populasi yang besar atau beragam dapat menciptakan potensi pasar dalam hal produksi dan konsumsi yang lebih tinggi. Terakhir, luas wilayah dengan kekayaan alam dan keanekaragaman budaya dapat mendorong sektor pariwisata dan industri kreatif, yang berperan dalam

---

<sup>1</sup> Mudrajad Kuncoro, perencanaan pembangunan daerah teori dan aplikasi, (Jakarta: Gramedia pustaka, 2018), hlm.

<sup>2</sup> Feriyanto, N. (2014). Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif. Indonesia. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

<sup>3</sup> Gregory, Makroekonomi, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2016), hlm. 212

pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup> Terkait dengan hal tersebut sesuai Badan Pusat Statistik, Indonesia di tahun 2023 memiliki 17.000 pulau, dengan luas wilayah negara 1,905 juta km<sup>2</sup>.<sup>5</sup> Berikut adalah 5 pulau dengan luas wilayah terbesar dan pertumbuhan ekonominya.

**Tabel 1.1**  
**5 Pulau Terluas Di Indonesia Dan**  
**Pertumbuhan Ekonomi (Dalam Persen) Tahun 2022**

No	Pulau	Luas Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi
		(Km <sup>2</sup> )	Persen
1	Papua	785.753	5,08
2	Kalimantan	743.330	4,94
3	Sumatra	473.481	4,69
4	Sulawesi	174.600	5,09
5	Jawa	126.700	5,31

Sumber : Kependudukan dan perekonomian Badan Pusat Statistik (Diakses: Sabtu, 10 Juni 2023, Pukul 08:00)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa wilayah terluas berada di Pulau Papua namun pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Pulau Jawa. Hal tersebut selain dikarenakan Pulau Jawa menjadi pusat ibu kota juga terdapat faktor lain seperti aksesibilitas yang baik, infrastruktur yang berkembang, konsentrasi industri dan aktivitas ekonomi yang tinggi, serta populasi yang besar dapat meningkatkan kegiatan perekonomian. Berikut adalah luas wilayah provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk sebagai berikut.

---

<sup>4</sup> Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern (Perkembangan Pemikiran Klasik Hingga Keynesian Baru), (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 97

<sup>5</sup> Kependudukan dan perekonomian Badan Pusat Statistik, 2023 (Diakses <https://www.bps.go.id/>)

**Tabel 1.2**  
**Luas Wilayah Per Provinsi Di Pulau Jawa Dan**  
**Jumlah Penduduk Tahun 2022**

No	Provinsi	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
		(Km <sup>2</sup> )	Juta Jiwa
1	DKI Jakarta	664,01	11,27
2	Banten	9.662,92	11,79
3	Jawa Barat	35.377,76	40,59
4	Jawa Tengah	32.800,69	37,23
5	Jawa Timur	47.799,75	41,15
6	DI Yogyakarta	3.133,15	3,68

Sumber : Kependudukan, Badan Pusat Statistik (Diakses: Sabtu, 10 Juni 2023, Pukul 08:00)

Pada tabel 1.2 dapat dilihat Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak. Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pariwisata, pertanian, industri manufaktur, dan perikanan yang kuat akan berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Potensi manufaktur di Jawa Timur terkenal dengan Kawasan Industri Gresik yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar dan terpadat di Indonesia.<sup>6</sup> Jumlah penduduk yang besar dengan luas wilayah tersebut Jawa Timur memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhannya. Terkait dengan hasil tersebut pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota ini harus mampu meningkatkan kegiatan perekonomiannya.

---

<sup>6</sup> Intan Auliyaul Masyuhroh, Perkembangan Industri Di Kabupaten Gresik Tahun 1996-2015, Jurnal Universitas Jember, Vol. 8 (2), 2019

Tak terkecuali di daerah Eks-karesidenan Kediri yang terdiri dari Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Kawasan tersebut dulunya merupakan Karesidenan Kediri, namun pada tahun 1957 pemerintah Republik Indonesia menghapus karesidenan sebagai pembagian administratif negara.<sup>7</sup> Daerah Eks-Karesidenan secara geografis memiliki akses yang baik ke pusat-pusat ekonomi regional seperti Surabaya dan Malang. Letaknya yang strategis memudahkan konektivitas dan mobilitas penduduk serta distribusi barang antar daerah.<sup>8</sup> Berikut adalah perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah Eks-Karesidenan Kediri.

**Tabel 1.3**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Eks-Karesidenan Kediri Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)**

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kediri	27.786	29.193	28.491	29.361	30.476
2	Kab. Nganjuk	17.373	18.304	17.990	18.640	19.543
3	Kab. Tulungagung	25.920	27.299	26.455	27.390	28.542
4	Kab. Blitar	24.286	25.530	24.945	25.700	26.823
5	Kab. Trenggalek	12.161	12.799	12.504	12.595	13.754
6	Kota Blitar	4.566	4.832	4.722	4.924	5.164
7	Kota Kediri	85.337	90.001	84.375	86.485	87.732

Sumber : Ekonomi dan perdagangan, Badan Pusat Statistik (Diakses: Sabtu, 10 Juni 2023, Pukul 08:00)

<sup>7</sup> Suhardi, Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Moderasi Alokasi Belanja Modal, Jurnal Ekuivalensi, Vol. 3 (2), 2017

<sup>8</sup> Linawati, Solikah, dan Zaman, Alokasi Belanja Daerah Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di karesidenan Kediri, jurnal majalah ekonomi, Vol. 23, no. 1

Berdasarkan tabel 1.3 perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di tahun 2022 adalah Kota Kediri. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut sesuai dengan teori Pertumbuhan Ekonomi Baru (*New Economic Growth Theory*) dalam Teddy, teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan negara atau wilayah untuk menghasilkan, mengadopsi, dan mengembangkan pengetahuan serta teknologi baru untuk menciptakan kekayaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Robert Malthus dalam teori kependudukan menyatakan bahwa perkembangan jumlah penduduk tidak menjadi jaminan terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Namun jumlah penduduk akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jika disertai oleh peningkatan daya beli riil masyarakat secara umum.<sup>10</sup> Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk di Eks-Karesidenan Kediri pada tahun 2018-2022.

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Eks-Karesidenan Kediri**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kediri	1.568.113	1.574.272	1.635.294	1.644.400	1.656.020
2	Kab. Nganjuk	1.051.900	1.054.611	1.103.902	1.109.683	1.117.033
3	Kab. Tulungagung	1.035.290	1.039.284	1.089.775	1.096.588	1.105.337
4	Kab. Blitar	1.157.500	1.160.677	1.223.745	1.231.013	1.240.322
5	Kab. Trenggalek	694.902	696.295	731.125	743.888	739.669

<sup>9</sup> Teddy Christanto Leasiwal, Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Variabel Makro Ekonomi, (Sumatera Barat: mitra cendekia media, 2022), hal.34

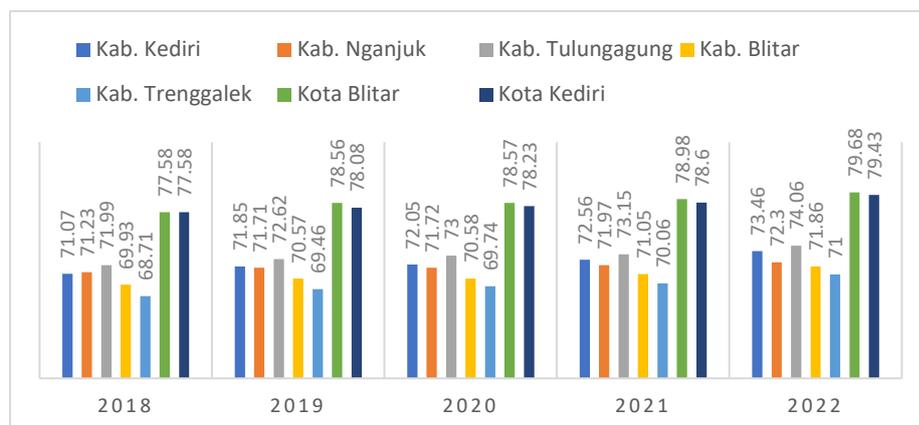
<sup>10</sup> Agustina Bidarti, Teori Kependudukan, (Bogor: Lindan Bestari, 2020), hlm. 54

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
6	Kota Blitar	140.971	141.876	149.149	150.371	151.960
7	Kota Kediri	285.852	287.409	286.796	287.962	289.418

Sumber : Ekonomi dan perdagangan, Badan Pusat Statistik (Diakses: Sabtu, 10 Juni 2023, Pukul 08:00)

Berdasarkan tabel 1.4 jumlah penduduk dari Eks-Karesidenan Kediri mengalami peningkatan disemua wilayah. Pertumbuhan penduduk tersebut akan mempengaruhi peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk. Kualitas jumlah penduduk dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu harapan hidup yang tinggi menunjukkan kualitas kesehatan yang baik, angka melek huruf yang tinggi mencerminkan tingkat pendidikan yang diperoleh, dan penghasilan per kapita yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi.<sup>11</sup> Berikut adalah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Eks-Karesidenan Kediri.

**Diagram 1.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Dalam Persen)**  
**Eks-Karesidenan Kediri Tahun 2018-2022**



Sumber : Sosial dan Kependudukan, Badan Pusat Statistik (Diakses: Sabtu, 10 Juni 2023, Pukul 08:00)

<sup>11</sup> Darwin, Lora, dkk., Indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi, (Sumatera Barat:Azka Pustaka, 2022), hlm. 35

Berdasarkan diagram 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Eks-Karesidenan Kediri terlihat terus mengalami peningkatan. Maka hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia di daerah Eks-Karesidenan Kediri memiliki kualitas yang meningkat di setiap tahunnya. Penelitian oleh Muqorrobin Menyatakan bahwa teori *Human Capital* diartikan bahwa individu dapat meningkatkan kapabilitas dan kemampuan. Dengan demikian, tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi dapat mengindikasikan adanya pendidikan yang baik, keterampilan yang relevan, dan kesehatan yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>12</sup>

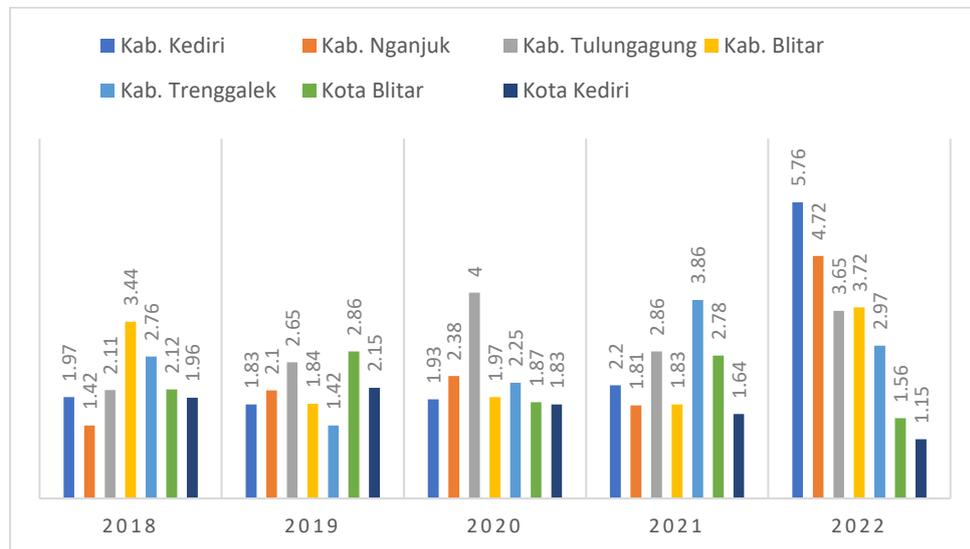
Inflasi sebagai indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat atau mengukur stabilitas perekonomian suatu daerah. Sebab dari adanya inflasi menunjukkan dampak secara keseluruhan makroekonomi, jika tidak cepat diatasi inflasi akan menekan kemampuan perekonomian dalam memproduksi karena melemahnya permintaan.<sup>13</sup> Berikut adalah perkembangan inflasi di Eks-Karesidenan Kediri.

---

<sup>12</sup> Moh Muqorrobin, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 5, 2017

<sup>13</sup> Ali Ibrahim, Ekonomi Makro, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.52

**Diagram 1.2**  
**Perkembangan Inflasi (Dalam Persen) Eks-Karesidenan Kediri**  
**Tahun 2018-2022**



Sumber : Ekonomi, Badan Pusat Statistik (Diakses: Sabtu, 10 Juni 2023, Pukul 08:00)

Berdasarkan diagram 1.2 inflasi Eks-Karesidenan Kediri terlihat mengalami naik turun berfluktuatif disemua wilayah. Inflasi yang tinggi membuat daya beli pekerja menurun, sehingga peningkatan upah minimum diperlukan untuk menjaga tingkat kesejahteraan dan mengimbangi kenaikan harga.<sup>14</sup> Menurut Mankiw, penetapan upah minimum ditentukan pada kebutuhan hidup masyarakat, indeks harga konsumen, tingkat upah minimum antar daerah, perkembangan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah.<sup>15</sup> Berikut adalah perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Kediri.

<sup>14</sup> Rina Dwi Rahmawati, Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10 No. 2, 2022

<sup>15</sup> Alridho, m. satrio, analisis pengaruh produk domestik bruto, inflasi dan upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran di indonesia periode 2002-2016, *Journal of Regional Economics*, 2018

**Tabel 1.5**  
**Upah Minimum Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kediri**  
**Tahun 2018-2022**

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kediri	1.713.400	1.850.986	2.008.504	2.033.504	2.043.422
2	Kab. Nganjuk	1.660.444	1.801.406	1.954.705	1.954.705	1.970.006
3	Kab. Tulungagung	1.671.035	1.805.219	1.958.844	2.010.000	2.029.358
4	Kab. Blitar	1.653.383	1.801.406	1.954.705	2.004.705	2.015.071
5	Kab. Trenggalek	1.509.816	1.763.267	1.913.321	1.930.321	1.944.932
6	Kota Blitar	1.640.439	1.801.406	1.954.635	2.039.024	2.239.024
7	Kota Kediri	1.758.117	1.899.294	2.060.925	2.118.116	2.318.116

Sumber : Ekonomi dan perdagangan, Badan Pusat Statistik (Diakses: Sabtu, 10 Juni 2023, Pukul 08:00)

Berdasarkan tabel 1.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dari 5 kabupaten dan 2 kota terlihat mengalami peningkatan disemua wilayah. Menurut Ricardo dalam Iskandar, teori keunggulan komparatif dalam penentuan upah minimum akan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut.<sup>16</sup> Ketika pekerja mendapatkan upah yang layak, daya beli masyarakat meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong permintaan konsumen dan menggerakkan sektor ekonomi.<sup>17</sup>

Penelitian oleh Fadilah menyebutkan bahwa ketika Upah Minimum Kabupaten/Kota yang meningkat akan menyebabkan pengeluaran konsumen meningkat yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat

<sup>16</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta :Mitra Wacana Media, 2015), hal. 68

<sup>17</sup> Mudrajad Kuncoro, *perencanaan pembangunan daerah teori dan aplikasi*, (Jakarta: Gramedia pustaka, 2018), hal. 38

meningkatkan daya beli pekerja, mendorong permintaan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Eks-Karesidenan Kediri Tahun 2018-2022”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di latar belakang, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah oleh seluruh unit usaha suatu daerah tertentu atau jumlah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi juga oleh pertumbuhan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian perlu dilakukan.

---

<sup>18</sup> Nur fadilah, pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk, Penanaman Modal Asing (PMA), penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020, Jurnal e-prints UPNYK, 2022

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan jumlah orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Sesuai data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Eks-Karesidenan Kediri mengalami peningkatan setiap tahun yang akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakatnya.

## 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Eks-Karesidenan Kediri, begitu juga sebaliknya.

## 4. Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana kenaikan harga-harga barang secara terus menerus. Apabila inflasi yang tinggi tanpa diimbangi oleh kenaikan upah dapat mengurangi daya beli pekerja dan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

## 5. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Penetapan upah minimum perlu memperhatikan berbagai macam faktor yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, biaya hidup, dan perbandingan

upah yang berlaku di daerah lain. Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat didorong oleh permintaan yang lebih tinggi terhadap tenaga kerja dan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, begitu juga sebaliknya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan pada latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah:

1. Apakah Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) berpengaruh pada Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) Eks-Karesidenan Kediri tahun 2018-2022?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan pada Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) Eks-Karesidenan Kediri tahun 2018-2022?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan pada Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) Eks-Karesidenan Kediri tahun 2018-2022?
4. Apakah inflasi berpengaruh signifikan pada Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) Eks-Karesidenan Kediri tahun 2018-2022?
5. Apakah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) berpengaruh signifikan pada Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) Eks-Karesidenan Kediri tahun 2018-2022?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) berpengaruh pada Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) Eks-Karesidenan Kediri tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) Eks-Karesidenan Kediri tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) Eks-Karesidenan Kediri tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) Eks-Karesidenan Kediri tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) Eks-Karesidenan Kediri tahun 2018-2022.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat untuk beberapa pihak sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Kajian ini akan menjadi acuan bagi pihak berwenang untuk menerapkan dengan baik tujuan Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan proses pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dampak jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya di wilayah Eks-Karesidenan Kediri.

2. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Tersusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai keterkaitan pertumbuhan ekonomi ke depan, baik bagi peneliti maupun masyarakat. Khususnya mengenai pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3. peneliti selanjutnya

Kesimpulan secara keseluruhan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang ekonomi khususnya mengenai jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulis mencakup empat variabel independen, yaitu jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Satu variabel dependen, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada penelitian ini menggunakan rentan tahun 5 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Diharapkan dengan 5 tahun sampel data akan cukup merepresentasikan bagaimana pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Eks-Karesidenan Kediri.

### **2. Keterbatasan Penelitian**

Sesuai dengan ruang lingkup penelitian sebelumnya, penelitian ini memanfaatkan data yang di publikasikan oleh situs resmi Badan Pusat Statistik. Peneliti tidak memungkinkan melakukan penelitian secara langsung untuk mendapatkan data kabupaten/kota di Eks-Karesidenan Kediri karena terkendala waktu dan tempat disebabkan lokasinya yang jauh dari peneliti dan membutuhkan waktu yang lama.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a) Jumlah Penduduk (X1)

Menurut Malthus, Jumlah penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun penambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat dengan kondisi demikian akan meningkatkan kesejahteraan dan kegiatan perekonomian akan sebanding dengan jumlah penduduk yang tersedia.<sup>19</sup>

#### b) IPM (Indeks Pembangunan Manusia) (X3)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis komponen dasar kualitas hidup. Sumber daya manusia adalah modal untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola seluruh potensi di daerahnya. Kualitas hidup masyarakat yang baik akan tercapainya kesejahteraan kehidupan melalui peningkatan produktivitas, kesejahteraan sosial, dan daya saing ekonomi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Agustina Bidarti, Teori Kependudukan, (Bogor: LINDAN BESTARI, 2020), hal. 08

<sup>20</sup> Darwin, Lora, dkk., Indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi, (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022), hal. 12

c) Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi merupakan presentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga.<sup>21</sup>

d) Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) (X5)

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum yang tinggi dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menghasilkan permintaan yang lebih tinggi, mendorong pertumbuhan sektor konsumsi dan bisnis.<sup>22</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini adalah “pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) berpengaruh pada Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) Eks-Karesidenan Kediri tahun 2018-2022” dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)

---

<sup>21</sup> Ali Ibrahim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 36

<sup>22</sup> Zulfikar, Wiridin, dan Wajdi, *Implementasi upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja*, (Malang: Ahlimedia Press, 2022), hal. 28

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) di wilayah Eks-Karesidenan Kediri tahun 2018-2022

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini akan disajikan dalam 6 bab dan disetiap bab akan terdapat sub bab sebagai penjelasan dari bab tersebut. Berikut sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, dalam bab ini memaparkan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah baik definisi konseptual maupun definisi operasional serta sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, bab ini memaparkan secara singkat mengenai kajian teori yang beisi penjelasan dari pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**, bab ini membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, bab ini merupakan inti dari pembahasan yang memaparkan hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

**BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**, bab ini memaparkan pembahasan data penelitian dan teknik analisis data.

**BAB VI PENUTUP**, bab VI akan membahas terkait simpulan dari peneliti yang sesuai dengan analisis data yang telah diteliti serta saran yang diperuntukkan kepada pihak yang memanfaatkan penelitian ini.